



Studi Komparatif *Student Loan* Australia, Amerika dan Swedia Serta Potensi Penerapannya di Indonesia

Syahidna Nahdi*, Halda Amalika, Hanna Azzahra, Wirawan Firman Nurcahya

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: Pembahasan penerapan *student loan* menjadi topik perbincangan masyarakat di awal tahun 2024. Hal ini diperkuat oleh munculnya kerja sama *fintech* dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan pernyataan Menteri Keuangan Indonesia pada acara Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2024. Melihat peluang diterapkan *student loan* di Indonesia, penelitian ini ditujukan untuk menelaah konsep *student loan* yang berhasil diterapkan di Australia, Amerika Serikat, dan Swedia dan dibandingkan dengan keadaan perekonomian Indonesia, serta merekomendasikan konsep *student loan* yang dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur pendekatan kualitatif komparatif. Jenis data yang diambil ialah data sekunder yang berasal dari *World Bank*, OECD, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema *student loan* negara Australia dapat diterapkan di Indonesia dengan melihat dari alur pengembalian pinjaman yang tidak menggunakan suku bunga dan proses pengembalian pinjaman ditagihkan melalui pengembalian gaji peminjam. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta dengan berkolaborasi bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kata Kunci: *Student Loan*, Pendidikan, Pinjaman, Suku Bunga, Keuangan Negara, Tenaga Kerja, CSR, Pajak

*Correspondence: Syahidna Nahdi
Email: Syahidnanahdy@gmail.com

Received: 30 May 2024
Accepted: 06 June 2024
Published: 13 June 2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: In 2024, *student loan* has become a nation-wide issue in Indonesia. And strengthened when Minister of Indonesia's Finance is validating the issue at Press Conference on the result of the 2024 KSKK I Periodic Meeting and appear the collaboration between *fintech* company with Bandung Institute of Technology (ITB). Seeking the opportunity of *student loan* implementation, this research purpose to analyze *student loan* concept at Australia, United State, and Sweden and comparison its scheme with Indonesia's economic situation. And give recommendation the most suitable scheme for Indonesia's government. This research uses a comparative qualitative study method. Secondary data from World Bank, OECD, and the Central Statistics Agency (BPS) has used in this research. Its shows that the Australia's *student loan* scheme could be implemented in Indonesia by looking at repayment flow, which it does not use the interest rate and directly billed through the return of the borrower's salary. Nevertheless, the government could work with the private sector by collaborating with the Ministry of Finance and the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology.

Keywords: *Student Loan*, Education, Loan, Interest Rate, State Finance, Labor, CSR, Tax

Pendahuluan

Setiap warga negara Indonesia dijamin hak pendidikannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Nadziroh *et al.*, 2018) dalam (Saragih *et al.*, 2022). Dengan tujuan memenuhi hak pendidikan warga negara Indonesia, pemerintah mulai melaksanakan kredit Pendidikan yang lebih dikenal dengan Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) pada tahun 1982.

Program KMI disubsidikan pemerintah RI kemudian diterapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam bentuk likuiditas bersubsidi ke Bank Negara Indonesia (BNI). Program ini bertujuan saat itu untuk mendorong mahasiswa lebih cepat lulus dari perguruan tinggi.

KMI dibatasi hanya untuk mahasiswa yang sudah masuk tahap akhir kuliah. Biaya kuliah di PTN saat itu sekitar Rp 375 ribu - Rp 562 ribu per tahun, sedangkan jumlah pinjaman pendidikan KMI maksimal sebesar Rp 750 ribu per tahun untuk S1, Rp 1,5 juta untuk S2, dan Rp 2,5 juta untuk S3 dengan suku bunganya 6 persen per tahun. Pinjaman harus dibayar dalam kurun waktu maksimal 10 tahun. Akan tetapi, program KMI ini mengalami kegagalan karena persyaratan untuk mendapat ijazah bagi kreditur harus dapat melunasi kredit pendidikannya namun nyatanya untuk mendapat pekerjaan mahasiswa hanya memerlukan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir sehingga tidak memerlukan ijazah asli. Hal tersebut menyebabkan kreditur atau mahasiswa tidak melunasi cicilan kredit pendidikannya.

Saat ini, Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja sama dengan Danacita, perusahaan pembayaran pinjaman online untuk pendanaan pendidikan dan kursus kompetensi bagi pelajar dan tenaga profesional di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), merupakan faktor pemicu dibukanya pembahasan mengenai konsep *student loan* pada masyarakat. Mendengar skema kerja sama tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyampaikan "Memang di Indonesia ini belum ada *student loan* yang disediakan pemerintah. Alhamdulillah sebetulnya kalau draftnya dan diskusi itu sudah lama, Dikti dan Kementerian Keuangan juga sudah mulai lagi membicarakan tentang *student loan* ini", di dalam acara Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2024 yang disiarkan secara LIVE pada tanggal 30 Januari 2024 melalui akun You Tube resmi Kementerian Keuangan.

Berdasarkan isi pasal 76 ayat 2 UU nomor 12 Tahun 2012 di atas sudah jelas penerapan *student loan* merupakan amanat dengan persyaratan khusus, yaitu tanpa bunga dan kemampuan bayar Mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang menanggung pembiayaan *student loan*. Jika pemerintah setuju dengan sistematis kerja sama ITB dengan Danacita mengenai alternatif pembayaran biaya pendidikan, maka terjadi kontradiksi dengan Ayat 2 Pasal 76 UU Nomor 12 Tahun 2012 yang menjadi landasan argumen pemerintah. Sehingga perlu adanya tinjauan lebih mendalam oleh pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan, mengenai penerapan *student loan* di Indonesia.

Melihat kemungkinan diterapkannya *student loan* di Indonesia, terdapat negara yang dapat dikatakan berhasil menerapkan konsep *student loan* dalam pendidikan salah satunya yaitu Australia. Program *Higher Education Loan Program* (HELP) dan *VET Student Loans* merupakan dua program pemberian pinjaman kepada mahasiswa pada pendidikan tinggi dan pendidikan kejuruan Program ini dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Pelatihan serta hutang dan pembayaran dikelola oleh *Australian Taxation Office* (ATO). Program ini memberikan pinjaman tanpa bunga, tetapi terutang diindeksi setiap tahunnya oleh inflasi berdasarkan indeks harga konsumen (CPI). Penyesuaian ini memastikan bahwa nilai pinjaman tetap relevan dengan inflasi, sehingga jumlah yang harus dibayar mahasiswa

nantinya mencerminkan nilai uang saat mereka meminjam. Selain itu, Pembayaran kembali pinjaman dimulai ketika pendapatan mahasiswa mencapai tingkat tertentu. Australia memungut pembayaran selama peminjam masih hidup, namun pada umumnya peminjam hanya menghabiskan waktu sembilan tahun untuk membayar kembali pinjamannya. Sistem ini memastikan bahwa pembayaran kembali pinjaman tetap terjangkau dan tidak membebani mahasiswa dengan kesulitan finansial.

Selanjutnya, terdapat negara Swedia yang menerapkan konsep Student Loan yaitu *The Swedish Board of Student Finance* (CSN) merupakan lembaga pemerintah yang mengelola keuangan mahasiswa Swedia, yaitu hibah dan pinjaman untuk studi. Terdapat ketentuan pembayaran, dimana mahasiswa mulai mulai melunasi hutang pendidikannya ketika mereka telah menyelesaikan studi dan membayar pinjaman tersebut enam bulan setelah menerima pembayaran pinjaman terakhir. Jumlah uang pinjaman yang dibayar oleh mahasiswa sesuai dengan berapa banyak yang dipinjam, serta mengikuti tingkat suku bunga terkini dan tingkat penyesuaian suku bunga maksimal 2 persen per tahun. Adapun durasi pembayaran pinjaman maksimum 25 tahun dan pembayaran dapat dilakukan secara bulanan ataupun empat bulan pembayaran per tahun (Februari, Mei, Agustus, dan November). Konsep *student loan* pada CSN ini, memberikan keringanan pembayaran pinjaman dengan menunda pembayaran selama sebulan atau dapat ajukan pengurangan selama satu periode. Namun ketika terjadi kegagalan pembayaran akan diberikan peringatan, lalu jika terjadi kegagalan Kembali akan diberikan biaya tambahan sebesar SEK 450 atau setara Rp.669.283,26. Dan ketika masih tetap tidak lakukan pembayaran, maka dapat dirujuk ke *the Swedish Enforcement Authority*.

Selanjutnya, Program SAVE diperkenalkan pada bulan Agustus 2023 yang bertujuan untuk meringkankan beban keuangan pinjaman mahasiswa dengan menawarkan pembayaran bulanan terendah diantara Paket IDR dengan menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran yang dimiliki. Khususnya, kebijakan ini memperluas pengecualian pendapatan hingga 225 persen dari garis kemiskinan federal dan memberikan subsidi bunga bagi peminjam yang melakukan pembayaran tepat waktu, sehingga mencegah peningkatan saldo. Rencana ini sangat menguntungkan bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah, pekerja layanan publik, lulusan *community college* dan mereka yang awalnya meminjam \$12,000 atau kurang dalam bentuk pinjaman mahasiswa.

Mulai bulan Juli, peminjam yang hanya memiliki pinjaman sarjana akan melihat pembayaran bulanan mereka dikurangi setengahnya, sehingga memberikan keringanan yang besar. Paket SAVE menghitung pembayaran bulanan berdasarkan pendapatan dan jumlah keluarga. Jika Anda menghasilkan \$32.800 per tahun atau kurang (kira-kira \$15 dolar per jam), pembayaran bulanan akan menjadi \$0, dan jika menghasilkan lebih dari itu, masih akan menghemat setidaknya \$1.000 per tahun dibandingkan dengan jumlah yang akan dibayarkan di bawah rencana pembayaran.

Terdapat penelitian yang relevan mengenai student loan oleh Rahmad Hidayat, Ara Hidayat, dan Mohamad Jaenudin (2023) dengan judul "*Evaluation of Indonesian Education Loan Programs: An Overview of Challenges and Implications in Public Access*". Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis artikel yang berkaitan dengan alasan

mengapa program pinjaman mahasiswa tidak diakui secara lebih luas di Indonesia dengan menganalisa implikasi pinjaman siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ulasan literatur dengan mengumpulkan berbagai sumber artikel yang berkaitan dengan isu-isu yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada banyak masalah dalam pinjaman pendidikan tidak dikenal luas seperti kebijakan pinjaman mahasiswa yang tidak relevan, tantangan dalam sistem aplikasi mereka, pinjaman yang tidak dapat dikembalikan yang akhirnya membebani masyarakat.

Kemudian terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farida, Dhieka Avrilia Lantana, Kumba Digdowiseiso (2023) dengan judul penelitian "*The Growth of Fintech on Student Loan Products in Indonesia: A Literature Study*". Tujuan dari penelitian untuk mengkaji pertumbuhan pinjaman mahasiswa di *fintech* di Indonesia. Metode yang digunakan didasarkan pada studi pustaka dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan pertumbuhan *fintech* pada produk pinjaman mahasiswa di Indonesia cukup signifikan, dan pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor tertentu baik COVID-19 maupun kondisi normal. Fenomena COVID-19 mendorong transformasi teknologi digital menjadi semakin masif, sementara dalam kondisi normal motif bisnis, perkembangan teknologi, kenaikan biaya kuliah, dan latar belakang mahasiswa yang beragam juga mendorong pertumbuhan pinjaman mahasiswa di *fintech* di Indonesia.

Penelitian terdahulu lainnya, dilakukan oleh Ahmad Zaki, Nurul Retno Hapsari, Satrio Gunung Tegar Koraag, Muhammad Irfan Mu'afi, Keny Rahmawati dengan judul "*Analisis Pertumbuhan Digital Entrepreneurship Startup Fintech Pada Segmentasi Produk Student Loan Indonesia*". Penelitian ini bertujuan untuk memberikan beberapa pilihan aplikasi baru untuk menunjang mahasiswa dalam meminjam uang untuk pendidikannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan mengungkapkan fakta-fakta kemudian dilanjutkan dengan analisis yang tidak hanya mendeskripsikan tetapi juga memberikan pengertian dan penjelasan. Hasil perkembangan *fintech* memunculkan beragam macam inovasi aplikasi di bidang jasa keuangan, termasuk alat pembayaran, alat pinjaman, alat simpanan dan sebagainya (Safitri, 2020). Beberapa *fintech* (P2P) di Indonesia melakukan segmentasi produk yang mana salah satunya adalah segmen produk student loan atau pinjaman dana pendidikan. Berikut 9 (sembilan) startup *fintech* yang memiliki segmentasi produk penyediaan student loan di Indonesia diantaranya Koinworks, Danamart.id, Pintek, Edufund, Cicil, Danadidik, DanaBagus, Danacita, DanaRupiah. Menurut BPS bahwa presentasi pendidikan jauh meningkat dibanding sebelumnya.

Selanjutnya terdapat penelitian relevan yang diteliti oleh Rinto Alexandro (2019) dengan judul penelitian "*Factors Affecting Student Financial Behavior in Indonesia*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi mahasiswa pendidikan ekonomi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Metode ilmiah yang digunakan untuk penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil analisis penelitian ini, bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendidikan ekonomi dan literasi ekonomi terhadap perilaku ekonomi baik secara parsial maupun simultan. Pendidikan ekonomi dan literasi ekonomi merupakan faktor yang berkontribusi

terhadap perilaku ekonomi dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya mengetahui manfaat dan risiko finansial yang dilakukan mahasiswa.

Selain itu, terdapat pula penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lusiana Ulfa Hardinawati (2015) dengan judul "*Student Loan as a Funding Solution for College Student in Indonesia*". Tujuan dari penelitian ini memberikan gambaran bagi pemerintah dalam memberikan solusi biaya kuliah bagi mahasiswa di Indonesia. Metode penelitian ini merupakan kajian pustaka yang diambil dari sumber literatur, berupa buku, jurnal, dan website yang berkaitan dengan permasalahan student loan di Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu Student loan diperlukan di Indonesia agar semua siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa terbebani masalah keuangan, namun pinjaman ini bukanlah sebuah keharusan melainkan sebuah pilihan.

Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lola Inganta Saragih, Padhilah Dikri, Kwat Sidik Wahyono, dan Suparna Wijaya (2022) dengan judul "*Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Pendidikan: Upaya Mendukung Pemerataan Pendidikan*". Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dampak dari perubahan skema pemajakan atas PPN Jasa Pendidikan yang semula dikecualikan dari objek PPN menimbulkan belanja perpajakan yang cukup besar namun implementasinya belum tepat sasaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan atas penghapusan UU HPP karena dinilai belum tepat sasaran sehingga penghapusan sebagian besar pengecualian PPN untuk memperluas basis PPN dianggap penting. UU HPP kemudian mengatur adanya fasilitas pembebasan PPN atau PPN tidak dipungut atas penyelenggaraan jasa pendidikan tertentu.

Pada beberapa penelitian relevan tersebut, dapat disimpulkan belum ada penelitian yang membahas mengenai perencanaan penerapan student loan dengan membandingkan konsep negara-negara yang berhasil menerapkan student loan tersebut seperti pada penelitian ini lebih fokus menjelaskan penerapan student loan pada negara Australia, Swedia dan Amerika Serikat, yang mana negara tersebut cukup dapat dikatakan negara yang mampu berhasil dalam mengimplementasikan student loan dalam pendidikan. Banyak negara yang menerapkan student loan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan mahasiswa tetapi masih banyak pula kekurangan dan kelebihan yang dihadapi di setiap negara tersebut. Walaupun negara tersebut memiliki notabene sebagai Negara Maju tetapi hal itu tidak menjamin kesejahteraan mahasiswanya untuk berpendidikan dengan nyaman dan terus maju. Meskipun begitu student loan sudah dapat dikatakan sebagai solusi dari permasalahan kesulitan anggaran mahasiswa

Hipotesis penelitian ini ialah Pemerintah Indonesia dapat melakukan penelaahan, pengkajian, dan proses observasi lebih lanjut berdasarkan penelitian ini maupun bisa mengikuti sistematisa *student loan* negara Australia, Swedia, atau pun Amerika Serikat. Penelitian ini ditujukan untuk dua hal, yaitu:

1. Meneliti konsep *student loan* yang telah berhasil diterapkan di negara Australia, Swedia, dan Amerika Serikat.
2. Memberikan jalan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait konsep *student loan* yang telah berhasil diterapkan dan menjadi

landasan penerapan *student loan* di Indonesia.

Human Capital Model

Becker (1985) yang terdapat pada Fahmi & Mulyono (2015) mendefinisikan teori *human capital* atau modal manusia berdasarkan pendidikan mampu mengajarkan para pekerja tentang keahlian yang berpotensi meningkatkan produktivitas dan kemungkinan kenaikan pendapatan akibat peningkatan keahlian. Teori modal manusia juga membahas mengenai pekerja dengan pekerjaan berupah rendah berpeluang besar untuk melakukan pergantian kerja daripada pekerja dengan gaji lebih tinggi. Pandangan bahwa manusia merupakan modal penting untuk proses produksi yang setara dengan modal fisik, teknologi, dan sumber daya Alam (Schultz, 1961) dalam Tasmillah et al. (2023).

Agustini & Tarigan (2023) berpendapat bahwa *Human capital* dalam konteks pendidikan berfokus pada peningkatan kualitas, kompetensi, pengetahuan, dan ketrampilan manusia yang dapat berkontribusi pada kemajuan dan produktivitas dunia pendidikan. Produktivitas modal manusia merupakan keunggulan yang diharapkan dengan pengendalian atas tingkat keunggulan pegawai di dalam penyelesaian pekerjaan. *Knowledge, skills, intellectual*, dan pengendalian emosi diperlukan penyelesaian pekerjaan yang lebih baik dan berhubungan dengan pengembangan modal manusia yang dinilai baik dan tepat sasaran (Endri, 2010) dalam (Agustini & Tarigan, 2023). Sehingga, modal manusia merupakan *output* utama yang dipertimbangkan pengembangannya di dalam dunia pendidikan agar sumber daya berkualitas mampu mengembangkan diri dan negaranya.

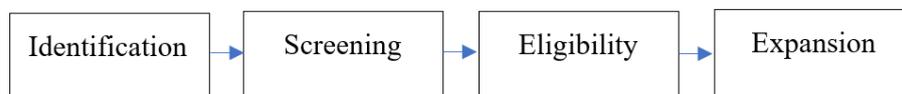
Cost-Sharing Model

Dewan Uni-Eropa menyatakan di dalam dokumen strategi yang terbit tahun 2020 mengenai *cost-sharing model* sebagai: "*high quality will only be achieved through the efficient and sustainable use of resources—both public and private, as appropriate*". Sedangkan, menurut World Bank (1992), model *cost-sharing* merupakan kesepakatan dimana dua atau banyak pihak setuju untuk melakukan pembagian pembiayaan dari suatu proyek atau kegiatan. Dalam dunia pendidikan, model *cost-sharing* diterapkan dalam pembiayaan pendidikan tinggi ataupun pendidikan keahlian.

D. Orr (2015) menyatakan terdapat tiga isu utama yang dibahas pada pengembangan kebijakan *framework cost-sharing model* yang berdampak pada keberlanjutan, efektivitas, dan modal. Keberlanjutan berarti kebutuhan untuk menemukan cara model pembiayaan yang dapat mencakup solusi dari tantangan perkembangan sektor perguruan tinggi di masa depan. Efektifitas berarti perguruan tinggi diharapkan mampu untuk menyediakan kurikulum terbaik untuk peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi, sehingga mampu bersaing pada pasar tenaga kerja. Modal berarti kebermanfaatan penggunaan modal mampu untuk berdampak pada pengembangan kompetensi lulusan perguruan tinggi dan sistem pendidikan yang diterapkan pada perguruan tersebut serta perguruan tinggi diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan angka penerimaan mahasiswa baru dan pengembangan fasilitas agar tidak terjadi peningkatan pada uang pangkal maupun uang per semester yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan teknik kajian pustaka berupa artikel, publikasi ilmiah nasional serta internasional dan juga konferensi ilmiah. Pada tinjauan literatur yang dilakukan pada penelitian ini, menggunakan pendekatan sistematis agar dapat memastikan pengumpulan data serta informasi yang berkualitas. Terdapat beberapa tahapan pendekatan sistematis yang dilakukan oleh Bardach & Klassen (2020), pertama mengidentifikasi pencarian kajian pustaka yang relevan dengan menggunakan *Google Scholar*, *Science Direct*, *Taylor & Francis*, serta media bantu lainnya untuk memperoleh penelitian yang relevan mengenai penerapan *student loan* di Indonesia. Kedua, dilakukan pemilihan dan evaluasi kajian pustaka seperti judul hingga topik yang relevan dengan menganalisis abstrak pada setiap artikel atau publikasi ilmiah. Ketiga, mengetahui kelayakan artikel atau publikasi ilmiah dengan mengkaji isi penelitian tersebut. Dan terakhir, melakukan perluasan pencarian lebih lanjut dari sumber-sumber artikel atau publikasi ilmiah yang relevan.



Gambar 1. Mekanisme Studi Literatur
(Bardach & Klassen, 2020)

Setelah dilakukannya literatur kajian pustaka, pada penelitian ini menggunakan data sekunder terkait penelitian yaitu pendidikan yang dapat diperoleh dari sumber data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada data tersebut dilakukan analisis secara deskriptif dengan tambahan grafik ataupun tabel untuk dijadikan bahan diskusi hingga dapat memudahkan pemahaman dari penjelasan penelitian mengenai perencanaan pemerintah dalam penerapan *student loan* di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

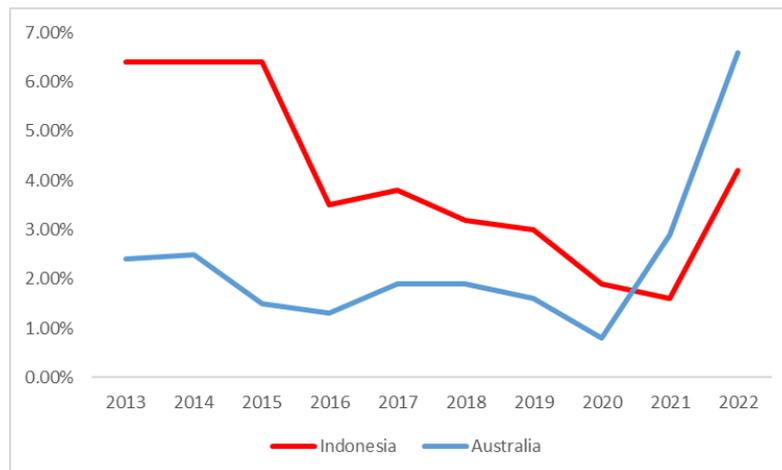
Penerapan Skema *Student Loan* di Australia Pada Indonesia

Australia merupakan negara yang memperkenalkan program pinjaman yaitu *Higher Education Loan Program* (HELP) yang disesuaikan dengan pendapatan peminjam serta tanpa suku bunga, namun disesuaikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK atau CPI). Kemudian, terdapat jumlah yang harus dibayarkan dihitung sebagai persentase dari pendapatan mereka di atas ambang batas yaitu sebesar \$51,550 pada tahun 2023-2024 ini. Persentase pendapatan yang dibayarkan berkisar antara 4% hingga 8% tergantung pada pendapatan (Austalian Goverment, 2023). Maka, semakin banyak penghasilan seseorang, persentase pembayarannya akan semakin tinggi, hingga 8%. Pelunasan pinjaman HELP

dijamin oleh sistem pajak atau *Australian Taxation Office* (ATO). Dalam hal mengajukan pinjaman, pemohon diminta untuk memberikan *Tax File Number* (TFN) yang merupakan nomor khusus yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Pelamar harus memberikan sertifikat aplikasi TFN yang dikeluarkan oleh ATO ketika dia tidak memiliki TFN (Chen & Han, 2019). Dengan melakukan ini, departemen pajak akan secara otomatis mengurangi jumlah pembayaran yang sesuai dari pendapatan siswa ketika pendapatan siswa melebihi ambang pembayaran minimum.

Program HELP di Australia, diperkirakan lebih dari dua juta orang telah memperoleh manfaat dari sistem student loan ini sejak 2011. Sistem ini telah membantu menyediakan pendapatan 30 miliar dollar Australia untuk digunakan dalam sistem pendidikan tinggi. Berdasarkan data yang bersumber Australian Bureau of Statistics, pada tahun 2020-2021 total pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan sebesar \$116,4 miliar dan biaya pendidikan tersier (pendidikan tinggi) sebesar \$40,2 miliar. Dapat dibandingkan rata-rata pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada sepuluh tahun terakhir dari tahun 2012-2021, di Indonesia sebesar 3,21% sedangkan negara Australia sebesar 5,24%. Pengeluaran biaya pendidikan di Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan Australia, dengan memiliki rata-rata perbedaan sekitar 2.03%. Hal ini kemungkinan dikarenakan program hibah atau pinjaman di Indonesia tidak sebanyak seperti Australia. Pada pendidikan di Indonesia ini, memiliki beberapa program bantuan pendidikan diantaranya, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kuliah; Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) untuk pengajar, pelaku budaya dan mahasiswa berprestasi; dan terdapat juga Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sedangkan di Australia memiliki hibah atau beasiswa serta pinjaman kuliah sebagai penunjang pendidikan, untuk hibah terdapat Beasiswa Pribumi untuk penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres; Program Rural and Regional Enterprise Scholarships (RRES); The Research Training Program (RTP) dan Beasiswa Fullbright. Kemudian untuk program pinjaman pendidikan terdapat HELP dan Vocational Education and Training (VET).

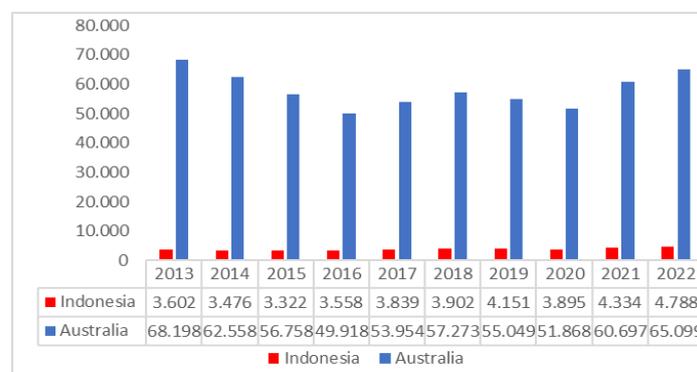
Kemudian, dikarenakan konsep pinjaman pendidikan di Australia mengindekskan kepada tingkat inflasi, maka dapat diketahui melalui grafik 1.2 mengenai perbedaan tingkat inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia dan Australia pada tahun 2013 hingga tahun 2022. Tingkat inflasi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Australia, dan inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif pada skema HELP yang diterapkan oleh Australia. Apabila Indonesia berencana menerapkan skema pinjaman yang serupa dengan Australia, maka perlu diperhatikan tingkat kestabilan inflasi berdasarkan IHK.



Grafik 1. Inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia dan Australia pada tahun 2013-2022 (%)

Sumber: *The World Bank, diolah*

Menurut kajian yang dilakukan oleh Elza Samantha Elmira, dkk (2019), menunjukkan skema *Income-Contingent Loan* (ICL) lebih tepat untuk Indonesia. Sistem ICL seperti yang diterapkan di Australia, bisa menjadi alternatif solusi karena mahasiswa diberi pinjaman untuk menyelesaikan pendidikannya dan dapat mulai mengembalikan pinjaman setelah lulus saat pendapatannya mencapai besaran tertentu dan tidak didasarkan pada lamanya waktu pembayaran. Berdasarkan data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas), pendapatan sebagian besar lulusan S1 adalah 13,8 juta rupiah per tahun atau 1,15 juta per bulannya. Pemerintah dapat mengatur agar setiap bulan seorang peminjam menyisihkan, seperti berkisar antara 4% hingga 8% sesuai dengan tingginya pendapatannya dan ditambah IHK. Maka dengan begitu, ketika pendapatan seseorang semakin besar, dapat lebih cepat melunasi pinjamannya. Sebaliknya, ketika peminjam menghadapi kesulitan ekonomi, maka secara otomatis peminjam memperoleh keringanan atau dapat menunda pembayaran utang. Periode pinjaman dapat berkisar 20–25 tahun, tergantung pada skema pembayaran utang. Jumlah subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah pun dapat dikalkulasi dengan terperinci.



Grafik 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita di Indonesia dan Australia Pada Tahun 2013-2022 (US\$)

Sumber: *The World Bank, diolah*

Pada data Grafik 2 dapat terlihat bahwa rata-rata pendapatan perkapita di Indonesia

dengan Australia memiliki perbedaan yang cukup jauh. Pada tahun 2022, penduduk Indonesia memiliki rata-rata pendapatan per kapita sebesar US\$ 4.788 atau sekitar 6,4 juta perbulannya. Sedangkan pendapatan penduduk negara Australia sebesar AUD \$ 8.151 per bulan atau sekitar 87 juta per bulannya. Ketika pendapatan per kapita penduduk Indonesia tersebut dipotong 4% (seperti persentase potongan yang ditetapkan Australia) atau sekitar Rp 250.000 dan ditambahkan dengan tingkat IHK Indonesia pada tahun 2022 sekitar 4,2% atau sekitar Rp 270.000 maka sisa pendapatan penduduk Indonesia tersisa 5.8 juta rupiah. Namun, dalam penerapan skema *student loan* seperti Australia tentu memiliki tantangan tersendiri dan sangat diperlukan perencanaan yang lebih matang.

Penerapan Skema *Student Loan* di Amerika Pada Indonesia

Sementara itu Tabel 1 menunjukkan perkiraan terhadap rencana SAVE yang diusulkan dan memasukkan keputusan SCOTUS atau MA Amerika baru-baru ini yang melarang toleransi pinjaman mahasiswa.

Tabel 1. Perkiraan terhadap rencana SAVE

Tahun	Year											Cohorts 2024-2033	Budget Window (2023-2033)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
Updated budgetary cost estimate without considering changes in community college or student borrowing decisions,	200,2	10,8	10,4	10,9	11,8	13,9	14,5	15,3	16,5	18	19,6	141,7	341,9
Adding new community college borrowers qualifying for Title IV student loan program	200,2	13,2	12,9	13,4	14,4	16,6	17,2	18,1	19,4	20,9	22,5	168,4	368,6
Adding increase in student borrowing													
Conservative Estimate	200,2	14,9	14,5	15,1	16,2	18,8	19,5	20,5	22	23,7	25,6	190,7	390,9
Maximum Estimate	200,2	29,3	28	28,9	30,8	35,6	36,6	38,2	40,7	43,7	46,9	358,6	558,8
Medium Estimate	200,2	22,1	21,3	22	23,5	27,2	28	29,4	31,3	33,7	36,3	274,7	474,9

Sumber : Penn Wharton University of Pennsylvania

Berdasarkan asumsi ini, diperkirakan total biaya sebesar \$342 miliar selama jangka waktu anggaran 10 tahun. Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, tingkat default untuk mahasiswa di banyak community college melebihi batas yang disyaratkan untuk kualifikasi program IDR. Rencana SAVE akan mengurangi tingkat gagal bayar, sehingga memungkinkan lebih banyak community college untuk berpartisipasi, dan meningkatkan biaya program. Memasukkan dampak ini akan meningkatkan biaya anggaran 10 tahun menjadi \$369 miliar. Berdasarkan undang-undang, mahasiswa tidak boleh meminjam lebih dari “biaya kehadiran” di institusi mereka, namun banyak mahasiswa saat ini (sebelum SAVE) meminjam kurang dari jumlah tersebut. Perkiraan “konservatif” yang ditunjukkan pada Tabel 1 mencakup peningkatan pinjaman siswa hanya sejauh bahwa hal tersebut pada dasarnya merupakan “uang gratis” bagi siswa tersebut, karena pembayaran di masa depan tidak akan meningkat karena batas pembayaran yang lebih rendah dibandingkan dengan definisi baru dari kebijakan bebas. pendapatan di bawah SAVE berdasarkan asumsi ini, biaya program SAVE 10 tahun meningkat menjadi \$391 miliar. “Perkiraan maksimum” mencakup pinjaman yang meningkat hingga setara dengan batas minimum pinjaman menurut undang-undang atau

biaya kehadiran di institusi yang dipilih. Berdasarkan asumsi alternatif ini, biaya program SAVE 10 tahun meningkat menjadi \$559 miliar. Perkiraan menengah, yang pada dasarnya berada di antara kedua ekstrem ini, menghasilkan biaya anggaran 10 tahun sebesar \$475 miliar.

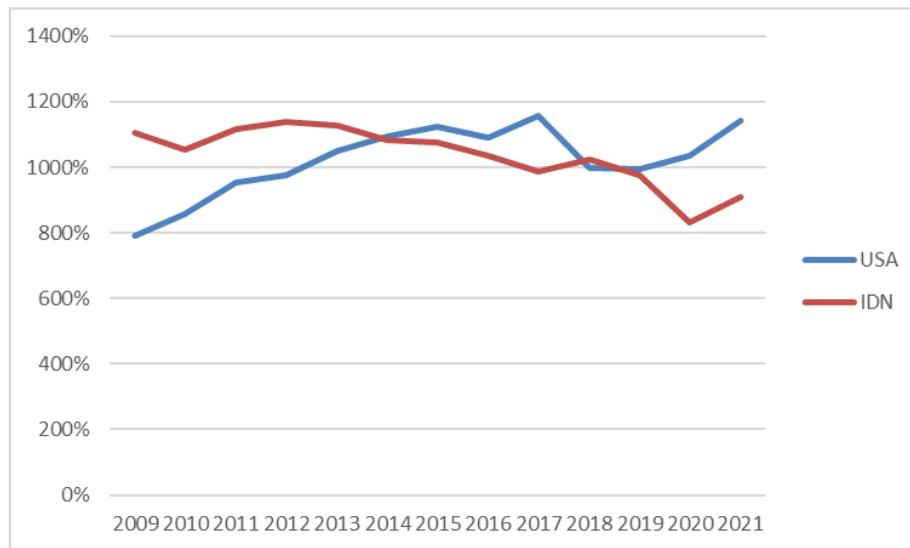
Tabel 2 menyajikan Rasio pembayaran kembali mengukur berapa banyak proyeksi pinjaman di masa depan yang diharapkan akan dibayar kembali baik sebagai pembayaran berdasarkan program jangka waktu tetap non-IDR. Secara lebih formal, rasio ini didefinisikan sebagai nilai sekarang bersih dari seluruh pembayaran di masa depan dibagi dengan jumlah pinjaman awal yang dipinjam. Rasio ini dapat melebihi 100 persen karena, berdasarkan konvensi, tingkat bunga yang digunakan untuk “diskon anggaran” secara efektif tidak disesuaikan dengan risiko dan oleh karena itu, tingkat ini lebih rendah daripada tingkat bunga pinjaman mahasiswa federal. Rasio pembayaran kembali sebesar 0 persen berarti peminjam tersebut diperkirakan tidak akan membayar kembali pinjamannya di bawah IDR.

Tabel 2. Rasio pembayaran kembali

Repayment Ratio	Fraction of Borrowers	Fraction of all Borrowing
0%	6,57%	4,98%
Greater than 0%, smaller or equal to 20%	13,76%	10,66%
Greater than 20%, smaller or equal to 40%	15,33%	10,70%
Greater than 40%, smaller or equal to 60%	14,53%	12,10%
Greater than 60%, smaller or equal to 80%	13,31%	12,26%
Greater than 80%, smaller or equal to 100%	11,90%	11,70%
Greater than 100%, smaller or equal to 120%	24,60%	37,60%

Sumber : Penn Wharton University of Pennsylvania

Seperti terlihat pada Tabel 2, sekitar 6,6 persen peminjam di masa depan tidak akan pernah melakukan pembayaran berdasarkan SAVE, atau sekitar 5,0 persen dari perkiraan total volume pinjaman yang disalurkan. Di antara semua peminjam pinjaman mahasiswa federal, 24,6 persen di antaranya melunasi pinjaman mereka, yang menyumbang 37,6 persen dari perkiraan pencairan pinjaman. Oleh karena itu, sekitar 62,4 persen dari perkiraan jumlah pinjaman yang disalurkan diperkirakan tidak dapat dilunasi seluruhnya.



Grafik 3. Perbandingan Tax Revenue Indonesia dan Amerika Pada Tahun 2009-2021 (%)

Sumber: The World Bank, diolah

Pertumbuhan pendapatan pajak AS secara konsisten melampaui pertumbuhan Indonesia sepanjang periode yang ditampilkan. Ini menunjukkan bahwa ekonomi AS mengalami pertumbuhan yang lebih kuat atau memiliki sistem pemungutan pajak yang lebih efisien dibandingkan dengan Indonesia selama periode ini. Pada tahun 2014 Indonesia memiliki penghasilan pajak sebesar 10,8% dan Amerika sebesar 10,8% dimana hal ini menunjukkan besaran penghasilan pajak yang cukup baik untuk Indonesia karna hampir sebanding dengan penghasilan pajak Amerika, Namun hal itu tidak berlangsung lama karena penghasilan pajak Amerika naik kembali di tahun 2015 yakni sebesar 11,2% sementara Indonesia masih berada di angka yang sama yakni 10,8%. Grafik garis menunjukkan bahwa Amerika Serikat mengalami pertumbuhan pendapatan pajak yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia dari 2009 hingga 2021.

Indonesia dan Amerika memiliki kesamaan dimana sebagian penghasilan negara dihasilkan dari pajak. Namun untuk skema Student Loan dimana Amerika memiliki sistem perpajakan progresif, di mana orang berpenghasilan tinggi membayar pajak dengan tarif yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan pemerintah AS untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan pajak, yang dapat digunakan untuk mendanai program pinjaman mahasiswa. Sementara Indonesia memiliki sistem perpajakan yang lebih datar, di mana orang-orang di berbagai tingkat pendapatan membayar tarif pajak yang relatif sama. Hal ini berarti bahwa pemerintah Indonesia mungkin tidak memiliki cukup pendapatan pajak untuk mendanai program pinjaman mahasiswa berskala besar seperti di AS. Tetapi, sampai saat ini Skema Student Loan masih ditinjau kembali oleh Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan sehingga belum pasti mengenai sistematisa budget untuk mendanai Student Loan.

Penerapan Skema *Student Loan* di Swedia Pada Indonesia

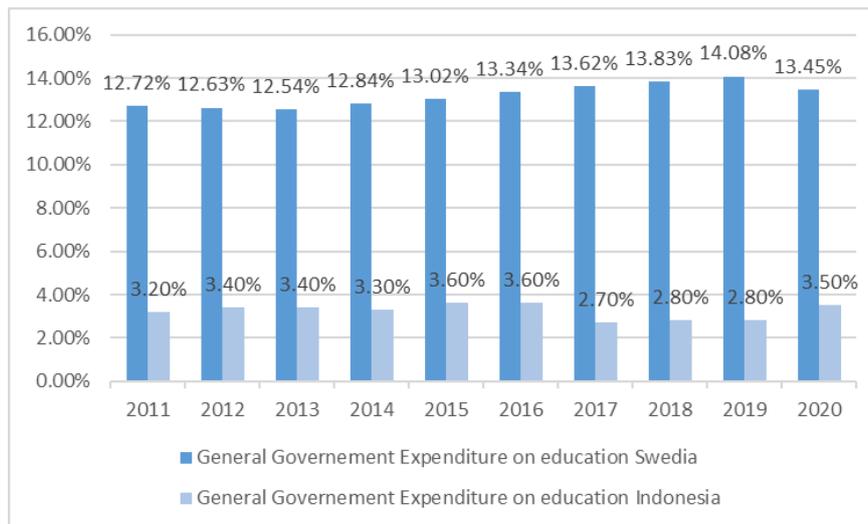
Selanjutnya ialah penerapan *student loan* di negara Swedia yang dikelola oleh *The Swedish Board of Student Finance* (CSN). CSN merupakan lembaga pemerintah Swedia yang didirikan untuk mengelola keuangan mahasiswa Swedia dengan menyediakan hibah dan pinjaman untuk pembiayaan masa studi dengan beberapa opsi pinjaman keuangan yang didalamnya terdapat persyaratan tertentu, seperti kondisi keuangan dan umur. Berdasarkan website resmi pemerintah Swedia yaitu [informationsverige.se](https://www.informationsverige.se) (<https://www.informationsverige.se/en/jag-har-fatt-uppehallstillstand/utbildning/bidrag-och-lan-fran-csn.html>) terdapat tiga tipe *student loan* yang ditawarkan oleh CSN, yaitu *student allowance*, *student aid*, dan *education entry grant*.

Study allowance merupakan tipe pendanaan yang diberikan kepada calon penerima yang menempuh pendidikan sekolah menengah atas sampai bertemunya musim semi tepat ketika calon penerima berumur 20 tahun. Terdapat beberapa sub-tipe *study allowance*, seperti *study grant* dan *supplementary allowances*. Untuk calon penerima *study grant* merupakan seseorang yang telah berumur 16 tahun dan sedang menempuh pendidikan sekolah menengah atas dan diwajibkan untuk menempuh jam kuliah penuh. Sedangkan, untuk calon penerima *supplementary allowances* merupakan seseorang dengan kriteria yang sama dengan *study grant* namun dengan latar belakang perekonomian yang kurang mendukung untuk melanjutkan pendidikan. Terdapat sanksi berlaku jika penerima tidak menempuh pendidikannya dengan baik, yaitu CSN akan langsung memberhentikan dukungan pendanaan dan akan langsung diberikan kewajiban untuk membayar pendanaan.

Student aid merupakan program *student loan* yang dibuka dari tanggal 1 juli. Persyaratan bagi calon penerima ialah sebelum dan telah berumur 20 tahun dan akan menempuh pendidikan tinggi (*post-upper secondary education*). Untuk skema *student aid* terdapat kewajiban untuk memenuhi kondisi tertentu seperti jadwal tempuh pembelajaran setidaknya 50 persen. Terdapat tambahan pendanaan jika calon penerima memiliki tanggung jawab asuh dan biasanya dikenal dengan *child allowance*. Seperti nama skemanya yaitu *student loan*, maka penerima diwajibkan untuk membayar biaya pendanaan yang nilainya tergantung pada beberapa nilai ekonomi yang berlaku, misalnya nilai suku bunga berlaku.

Education entry grant merupakan program *student loan* yang diberikan kepada seseorang yang belum menyelesaikan tingkat sekolah menengah atas namun memiliki kewajiban penyelesaian pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan. Persyaratan untuk calon penerima ialah tidak bekerja dan berumur antara 25 sampai 60 tahun. Pendaftaran *education entry grant* dapat dilakukan pada kota yang memiliki kantor cabang CSN.

Berdasarkan website resmi *European Commission* terkait pendanaan untuk program *student loan* berasal dari rencana anggaran tahunan negara Swedia. Untuk optimalisasi fasilitas pendidikan kementerian pendidikan dan riset negara Swedia yaitu *Utbildningsdepartementet* dengan sasaran program berupa penyelesaian tujuan-tujuan pendidikan yang dilakukan oleh pendidikan tinggi.



Grafik 4. Perbandingan Pengeluaran Pemerintah Negara Swedia dan Indonesia dalam Pendidikan (% dari PDB) Periode 2011-2020

Sumber: The World Bank, diolah

Mangkoesobroto dalam Mongan (2019) menyampaikan bahwa pengeluaran pemerintah sebagai cerminan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang mempunyai konsekuensi biaya. Negara Indonesia memiliki fundamental aturan yang kuat mengenai pembiayaan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang di amandemen pada tahun 2009, menyatakan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Jadi, sumber pembiayaan pendidikan negara Indonesia dan Australia berasal dari rancangan biaya yang ditelaah disahkan dan ditetapkan. Namun, melihat Grafik 5 yang menggambarkan kesungguhan negara Swedia dalam mempersiapkan lingkungan pendidikan kondusif dan tidak memberatkan golongan tertentu menimbulkan ketimpangan optimalisasi pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan.

Rentang pengeluaran pemerintah dalam hal pendidikan negara Swedia berada pada 12,54 persen sampai 14,08 persen. Pengeluaran pemerintah ini masuk ke dalam pos-pos program yang telah dirancang oleh *Utbildningsdepartementet* selaku Kementerian Pendidikan dan Riset Swedia. Jika, dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah dalam hal pendidikan negara Indonesia yang berada pada rentang 2,70 persen sampai 3,60 persen maka dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia sebaiknya melakukan optimalisasi anggaran dana pendidikan yang disediakan khusus dari APBN agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat.

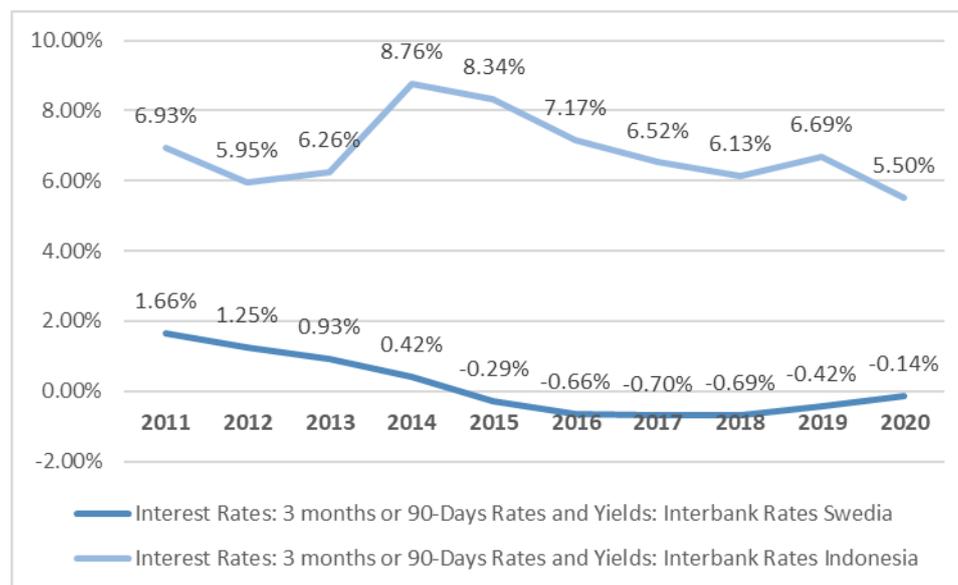
Negara Swedia memberikan aturan pembayaran uang pinjaman *student loan* dengan menambahkan bunga yang penetapannya diambil berdasarkan suku bunga berlaku. Jumlah pinjaman yang akan diberikan oleh CSN tergantung pada jenis jam pendidikan yang ditempuh, jumlah jadwal belajar mingguan, dan jumlah pendapatan yang miliki. Misalnya contoh jumlah pinjaman yang ada pada website resmi CSN sebagai berikut.

Tabel 2. Contoh Jumlah Pemberian Pinjaman, 2024 (berdasarkan jumlah minggu berlaku)

Jenis Pembiayaan	1 minggu, SEK	4 minggu, SEK	20 minggu, SEK
Grant	997	3.988	19.940
Student loan	2.292	9.168	45.840
Total	3.289	13.156	65.780

Sumber: CSN

Jumlah uang pinjaman yang dibayar oleh mahasiswa sesuai dengan berapa banyak yang dipinjam, serta mengikuti tingkat suku bunga terkini dan tingkat penyesuaian suku bunga maksimal 2% per tahun. Adapun durasi pembayaran pinjaman maksimum 25 tahun dan pembayaran dapat dilakukan secara bulanan ataupun empat bulan pembayaran per tahun (Februari, Mei, Agustus, dan November). Konsep *student loan* pada CSN ini, memberikan keringanan pembayaran pinjaman dengan menunda pembayaran selama sebulan atau dapat ajukan pengurangan selama satu periode. Namun ketika terjadi kegagalan pembayaran akan diberikan peringatan, lalu jika terjadi kegagalan Kembali akan diberikan biaya tambahan sebesar SEK 450 atau setara Rp.669.283,26. Dan ketika masih tetap tidak lakukan pembayaran, maka dapat dirujuk ke *the Swedish Enforcement Authority*.



Grafik 5. Perbandingan Suku Bunga Berlaku 3 Bulan atau 90 Hari (Antar Bank Dalam Negeri) Negara Swedia dan Indonesia Periode 2011-2020

Sumber: OECD, diolah

Grafik 5 menunjukkan perbandingan jumlah suku bunga berlaku 3 bulan atau 90 hari yang ditetapkan oleh negara Swedia dan Indonesia. Dengan melihat konsistensi data rentang suku bunga Swedia, maka pola penetapan suku bunga terdapat bunga pinjaman *student loan* yang ditetapkan CSN masih mampu untuk dibayar kembali oleh mahasiswa. Sedangkan, suku bunga berlaku 3 bulan atau 90 hari yang dimiliki oleh negara Indonesia memiliki rentang cukup tinggi yang mengindikasikan akan adanya peluang gagal bayar

oleh mahasiswa di dalam pembayaran kembali pinjaman yang diberikan. Sehingga, tidak disarankan untuk penerapan konsep *student loan* negara Swedia pada negara Indonesia.

Penerapan Skema *Student Loan* Pada Indonesia

Pada hasil penjelasan perbandingan penerapan skema program *student loan* pada negara-negara yang berhasil menerapkan program tersebut, *Student loan* di Indonesia perlu dikelola khusus oleh BUMN atau Badan Layanan Umum (BLU). Modal awal dana *student loan* dapat diambil dari APBN. Namun demikian BUMN/BLU tersebut dapat menghimpun dana yang berasal dari hibah, CSR, bantuan internasional atau sumber dana lainnya. Pinjaman dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu hingga maksimal 25 tahun dengan imbalan hasil atau di indeks kan dengan tingkat inflasi negara seperti konsep *student loan* di Australia. Terdapat pula beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam menerapkan skema *student loan* di Indonesia sebagai berikut:

1. Skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Insentif Pajak. Pemerintah Indonesia dapat melibatkan pihak swasta dengan bekerja sama melalui memanfaatkan CSR sebagai strategi untuk meningkatkan sumber dana program pinjaman pendidikan. Pembayaran pihak swasta kepada pemerintah untuk melunasi kewajiban *student loan* pegawai yang direkrutnya diakui sebagai CSR atau pengurang pajak. Hal ini dapat menjadi insentif partisipasi pihak swasta pada skema ini. Pada penelitian yang dilakukan oleh Farida et al. (2023) menjelaskan bahwa, keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan pendidikan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kelangsungan program pinjaman siswa. Ini sejalan dengan model *cost-sharing* yang dapat diterapkan pada program *student loan* di Indonesia, di mana kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan program. Namun, perlu dilakukan seleksi mitra swasta yang dapat bekerja sama dalam menjalankan program *student loan* di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi agar dapat memastikan mitra swasta yang terlibat memiliki komitmen yang kuat serta kapasitas finansial yang memadai. Memilih mitra yang tepat dalam program pembiayaan bersama sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Alexandro, 2019). Maka, pemilihan mitra swasta yang tepat akan memastikan keberlanjutan program tersebut dan mengurangi risiko finansial bagi semua pihak yang terlibat.
2. Skema Ikatan Dinas Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Swasta. Khusus untuk pegawai swasta mekanismenya adalah pihak swasta merekrut pegawai yang memiliki kewajiban *student loan* disertai ikatan dinas. Pihak swasta melakukan pembayaran kepada pemerintah sebagai pengganti *student loan*. Program ikatan dinas untuk peminjam yang telah lulus pendidikan dapat membantu mengurangi kemungkinan gagal bayar. Dengan metode ini, peminjam dapat bekerja untuk perusahaan atau lembaga pemerintah dalam jangka waktu tertentu sebagai pengganti pembayaran pinjaman mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al. (2023), salah satu masalah utama dengan program pinjaman mahasiswa adalah peminjam tidak dapat melunasi pinjaman setelah lulus sekolah karena kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dengan pemberlakuan skema ini,

- peminjam akan lebih terlindungi dari kegagalan pembayaran dengan ikatan dinas.
3. Skema Pasar. Menciptakan bursa tenaga kerja khusus untuk peserta pinjaman siswa dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menghubungkan peminjam dengan perusahaan yang mencari karyawan yang memenuhi kriteria. Selain itu, bursa tenaga kerja ini dapat menawarkan informasi tentang pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi dan kemampuan peminjam.
 4. Kombinasi Skema. Hal ini dapat menjadi solusi yang lebih luas dan efisien dapat dihasilkan dengan menggabungkan ketiga strategi tersebut. Pasar dan skema ikatan dinas dapat membantu lulusan menemukan pekerjaan, dan skema CSR atau insentif pajak dapat menarik partisipasi perusahaan. Secara keseluruhan, kombinasi ini dapat meningkatkan keberhasilan program *student loan* dengan menciptakan lingkungan yang saling mendukung.

Terdapat pula beberapa alur penerapan skema *student loan* di Indonesia yang dapat diketahui melalui diagram dibawah ini,



Diagram 1. Skema Alur Penerapan *Student Loan* di Indonesia

Sumber: Hasil penelitian penulis

Pada penjelasan alur tersebut, penerima pinjaman pendidikan yang ditujukan pada mahasiswa yang memenuhi syarat tertentu seperti usia dan status pendidikan yang dapat dibuatkan oleh pemerintah. Kemudian, peminjam dapat mengajukan permohonan pinjaman melalui sebuah platform resmi yang dikelola oleh pemerintah ataupun BUMN. Setelah dilakukannya verifikasi kelayakan dan persetujuan oleh instansi terkait, dana pinjaman pendidikan dapat disalurkan langsung ke lembaga pendidikan. Tahap selanjutnya, pembayaran kembali dapat dilakukan ketika peminjam telah lulus pendidikan dan memiliki pendapatan diambang batas tertentu seperti pada konsep *student loan* di Australia. Pembayaran pinjaman dilakukan bulanan dan terdapat persentase pembayaran

dari besarnya pendapatan yaitu sekitar 4%-8%. Pembayaran pinjaman dapat melalui pemotongan gaji secara otomatis dan juga pengelolaan pembayaran dilakukan oleh kantor pajak atau instansi keuangan yang terkait. Terakhir mengenai pengelolaan dan pengawasan *student loan* dapat dilakukan oleh oleh BLU atau BUMN yang khusus dibentuk untuk mengelola *student loan*, serta pengawasan dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan atau berkolaborasi dengan lembaga pendidikan hingga perusahaan swasta.

Pada skema dan alur tersebut, perlu dipertimbangkan pula penanganan kegagalan pembayaran para peminjam pada skema *student loan*, dimana kegagalan pembayaran utang pendidikan merupakan sebuah tantangan yang dapat terjadi pada setiap negara. Di Indonesia, penanganan gagal bayar pinjaman pendidikan ini dapat diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Metode ini memungkinkan pemerintah mengatasi gagal bayar dengan lebih fleksibel dan efektif. Salah satu faktor yang berkontribusi pada kegagalan program pinjaman mahasiswa sebelumnya adalah pendekatan yang terlalu tegas dan tidak fleksibel terhadap peminjam yang mengalami kesulitan keuangan (Hardinawati, 2015). Diharapkan proses penyelesaian piutang akan lebih efisien dan adil bagi semua pihak jika PUPN menanganinya. Berdasarkan data serta pengalaman dari negara lain yang telah menerapkan program *student loan* tersebut, pemerintah Indonesia dan pihak terkait perlu melakukan evaluasi serta perbaikan pada skema peminjaman pendidikan.

Kesimpulan

Penerapan *student loan* di Indonesia masih butuh banyak pertimbangan dan dirincikan dengan baik dengan melihat keberhasilan skema *student loan* yang ada di Negara Amerika, Australia, dan Swedia. Ketiga negara tersebut menerapkan skema *student loan* dengan mempertimbangkan keuangan negara mereka masing-masing, dimulai dari PDB, Tingkat Inflasi, Pajak, dan Suku Bunganya serta Pengeluaran untuk pendidikan. Untuk hasil penelitian mengenai penerapan *student loan* di Indonesia sendiri adalah Indonesia bisa berkolaborasi antara pihak pemerintah dan pihak swasta untuk permasalahan pendanaan selanjutnya krena pendanaan awal bersumber dari APBN. Penyeleksian pendanaan dari pihak swasta menjadi penentu masa depan *Student Loan* untuk mengantisipasi gagal bayar di masa depan. Setelah menganalisis *student loan* untuk penerapan di Indonesia, maka saran atau rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah :

- Menggunakan skema CSR atau Corporate Social Responsibility untuk memastikan keterlibatan kemitraan dan menjalin kerja sama langsung untuk turut bertanggung jawab mengenai pembiayaan pendidikan.
- Bekerja di pemerintahan atau ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai jaminan jika tidak dapat membayar pinjaman *student loan*,
- Menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk peminjam *student loan* karena dengan bekerja di pemerintahan tersebut peminjam tidak lagi memikirkan bagaimana sisa

pembayaran pinjaman pendidikan

Dengan kebijakan yang diusulkan tersebut dan berbagai pertimbangan perhitungan yang akan diterapkan mengenai student loan tersebut maka skema student loan akan bisa dilaksanakan namun penulis memiliki keterbatasan dalam data anggaran atau pendaanaan mengenai student loan di Indonesia maka diharapkan peneliti selanjutnya dapat menyertakan anggaran atau sistem pendanaan yang lebih merinci mengenai skema student loan ini.

Daftar Pustaka

- Alexandro, R. (2019). Factors Affecting Student Financial Behavior in Indonesia. *American Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(2), 380–391. <https://doi.org/10.20448/801.42.380.391>
- Australian Government. (2023). *2024 OS-HELP STATEMENT OF TERMS AND CONDITIONS*. www.studyassist.gov.au.
- Avrilia Lantana, D., & Digdowiseiso, K. (2023). The Growth of Fintech on Student Loan Products in Indonesia: A Literature Study. In *Management, Business and Social Science (IJEMBIS) Peer-Reviewed-International Journal* (Vol. 3, Issue 2). <https://cvodis.com/ijembis/index.php/ijembishttps://cvodis.com/ijembis/index.php/ijembis/article/view/238>
- Bardach, L., & Klassen, R. M. (2020). Smart teachers, successful students? A systematic review of the literature on teachers' cognitive abilities and teacher effectiveness. In *Educational Research Review* (Vol. 30). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100312>
- Barr, N., Chapman, B., Dearden, L., & Dynarski, S. (2019). The US college loans system: Lessons from Australia and England. *Economics of Education Review*, 71, 32–48. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.07.007>
- Curaj, A., Matei, L., Pricopie, R., & Salmi, J. (2015). *The European Higher Education Area* (P. Scott, Ed.). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-20877-0>
- Dimmera, B. G. (2019). *IMPACT OF STUDENT LOAN IN EMPOWERMENT THE COMMUNITIES*. 1(1). <https://media.neliti.com/media/publications/328058-impact-of-student-loan-in-empowerment-th-c152755d.pdf>
- Ekainsai, S. Z., Eniekezimene, F. A., & Krokeyi, W. S. (2020). Effectiveness of Higher Education Loan Scheme in Financing Tertiary Education in Bayelsa State, Nigeria. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 8(6). <https://doi.org/10.24940/theijhss/2020/v8/i6/HS2006-106>
- Elmira, E., Suryadarma, D., & Suyardi, A. (2019). *Pinjaman Berbasis Pendapatan untuk Meningkatkan Akses terhadap Pendidikan Tinggi*. <https://smeru.or.id/id/publication-id/pinjaman-berbasis-pendapatan-untuk-meningkatkan-akses-terhadap-pendidikan-tinggi#:~:text=Salah%20satu%20cara%20untuk%20meningkatkan%20partisipasi%20p>

- endidikan%20tinggi%2C,dengan%20menyediakan%20pinjaman%20untuk%20pendidikan%20mahasiswa%20%28student%20loan%29.
- Fahmi, M., & Mulyono, Y. O. (2015). Pendidikan, Human Capital atukah Signaling? Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 15(2), 113–120. <https://doi.org/10.21002/jepi.v15i2.01>
- Guasoni, P., & Huang, Y.-J. (2022). *Minimizing the Repayment Cost of Federal Student Loans*. <https://doi.org/10.1137/22M1505840>
- Hidayat, R., Hidayat, A., Jaenudin, M., Uin, P., Gunung, S., & Bandung, D. (2023). *Evaluation of Indonesian Education Loan Programs: An Overview of Challenges and Implications in Public Access*. <https://doi.org/10.23971/1f.v7i2.7728>
- Meas, C. (2021). *The Demand of Student Loan in Higher Education: A study on Cambodian Context*. <https://www.researchgate.net/publication/355184767>
- Natalia, C., & Wahyudi, S. T. (2023). Apakah Modal Manusia Penting untuk Mengangkat Jawa Timur dari Jebakan Kelas Menengah? *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 23(2), 170–182. <https://doi.org/10.21002/jepi.2023.11>
- P., S., & Raghurama, A. (2018). A Study on Student Loan Schemes in India and Australia. *IRA-International Journal of Management & Social Sciences (ISSN 2455-2267)*, 12(2), 31. <https://doi.org/10.21013/jmss.v12.n2.p3>
- Saragih, L. I., Dikri, P., Wahyono, K. S., & Wijaya, S. (2022). Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Pendidikan: Upaya Mendukung Pemerataan Pendidikan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 674–680. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1975>
- Syaza, I. (2021). *The Prospect of Income-Contingent Loans for Malaysia Higher Education Student Financing*.
- Tasmilah, T., Pratomo, D. S., & Syafitri, W. (2023). Pengaruh Modal Manusia terhadap Transisi Tenaga Kerja Formal Menjadi Informal pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 23(1), 65–80. <https://doi.org/10.21002/jepi.2023.05>
- The Swedish Board of Student Finance. (2024, January 1). *Repaying student loans or demands*. The Swedish Board of Student Finance (CSN).
- Ulfa Hardinawati, L. (2015). *Student Loan as a Funding Solution for College Student in Indonesia*.
- Virza, A. U. (2020). *A Literature Review of Financing the Tertiary Education In Indonesia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.8888/ijospl.v4i6>
- Yunus, U. (2019). A Comparison Peer to Peer Lending Platforms in Singapore and Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1235(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1235/1/012008>